



JAMKESDA DIHAPUS TAHUN 2019

Pemegang KMS Dialihkan JKN

UMBULHARJO (MERAPI) - Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Yogyakarta pada tahun 2019 bakal ditiadakan. Jamkesda akan diintegrasikan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Untuk itu Pemkot Yogyakarta mengalihkan pengakses Jamkesda dari pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) ke JKN BPJS.

"Otomatis 2019 Jamkesda tidak ada karena migrasi ke BPJS Kesehatan. Makanya sekarang ini proses pemindahan warga (miskin) kota ke BPJS terus ditambah," kata Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, usai penandatanganan perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan, Jumat (27/10).

Dia menuturkan selama ini Jamkesda Kota Yogyakarta sudah memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh warga. Lantaran mengikuti ketentuan pemerintah pusat agar seluruh jaminan kesehatan dari pemerintah disatukan dengan JKN BPJS Kesehatan di 2019, maka pemkot mendorong kepesertaan warga.

Sampai 30 September 2017, warga Kota Yogyakarta yang terdaftar dalam JKN Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS Kesehatan sebanyak 381.611 jiwa dari 410.262 jiwa. Pada Oktober 2017 ini ada penambahan 8.806 jiwa warga kota menjadi peserta JKN-KIS dari warga miskin pemegang KMS dan pegawai pemkot non PNS sehingga kepesertaan di

Yogya mencapai 95 persen. Pemkot Yogyakarta akan menanggung premi BPJS Kesehatan untuk pemegang KMS.

"Anggaran Jamkesda masih ada nantinya dipindah untuk biaya BPJS kesehatan. Tapi memang ada aturan-aturan yang harus menyesuaikan dengan kepesertaan BPJS," tutur Heroe.

Kepala Seksi Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Umi Nur Chariyati menambahkan, seluruh pemegang KMS di Kota Yogyakarta didaftarkan BPJS kesehatan. Termasuk pemegang KMS yang sebelumnya menjadi peserta BPJS mandiri dan menunggak premi. "Yang menunggak sudah diselesaikan. Ada kesepakatan tunggakan premi harus dibiayai sendiri oleh peserta. Lalu kepesertaan BPJS mandiri kita alihkan sebagai peserta BPJS penerima bantuan iur yang ditanggung pemkot. Kami akan sisir lagi. Kalau masih ada warga miskin yang belum masuk bisa melapor," papar Umi.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari mengatakan, pada 1 Januari 2019 diharapkan seluruh penduduk Indonesia terdaftar JKN KIS atau cakupan semesta jaminan kesehatan. "Soal konsekuensi bagi yang belum masuk BPJS Kesehatan, kami melihat tidak pada sanksi. Kami terus mendorong masyarakat untuk mendaftar JKN," ujar Andayani. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005